**Raih Opini WTP 8 Kali Berturut-turut, Pemkab HSS Terima Plakat dan Piagam**

****

**Sumber gambar:**

<https://kalselpos.com/2021/10/19/raih-opini-wtp-8-kali-berturut-turut-pemkab-hss-terima-plakat-dan-piagam/>

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Hulu Sungai Selatan (HSS) menerima plakat dan piagam penghargaan atas penghargaan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) delapan kali berturut-turut hingga 2020 dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia (RI).

Plakat dan piagam penghargaan WTP tersebut diserahkan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) kepada Bupati HSS Achmad Fikry didampingi Wakil Bupati Syamsuri Arsyad, Selasa (19/10) di aulah Rakat Mufakat Setda.

Selain penyerahan plakat tersebut, dilakukan penandatanganan nota kesepahaman antara Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Kalsel dan Pemkab HSS tentang pemanfaatan bersama data dan informasi dan penguatan koordinasi penyelenggaraan pelaksanaan kebijakan pengelolaan Klkeuangan publik, dalam pelaksanaan hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Kakanwil Dirjen Perbendaharaan Provinsi Kalsel Sulaimansyah mengatakan, maksud nota kesepakatan adalah sebagai landasan bagi para pihak, dalam kegiatan pemanfaatan bersama data dan informasi serta penguatan koordinasi penyelenggaraan pelaksanaan kebijakan pengelolaan keuangan publik dalam pelaksanaan hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah.

“Tujuannya untuk pemanfaatan bersama Data dan Informasi dan penguatan Koordinasi Penyelenggaraan pelaksanaan kebijakan pengelolaan Keuangan publik dalam pelaksanaan hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah,” ujarnya.

Sementara itu, Bupati HSS Achmad Fikry mengatakan opini WTP delapan kali berturut-turut merupakan hasil kerja keras dari OPD untuk terus mengelola keuangan dan aset dengan baik.

“Semoga WTP delapan kali ini, menjadi pendorong bagi Pemkab HSS untuk terus berbuat yang terbaik, dalam hal pengelolaan keuangan daerah secara professional, akuntabel, dan transparan,” ujarnya.

Terkait nota kesepahaman, Bupati Fikry berharap semoga bisa memberikan manfaat yang besar bagi kemajuan HSS, termasuk pendampingan yang dilakukan oleh Kakanwil Dirjen Perbendaharaan Provinsi Kalsel.

**Sumber berita:**

1. <https://kalselpos.com/2021/10/19/raih-opini-wtp-8-kali-berturut-turut-pemkab-hss-terima-plakat-dan-piagam/>, *Raih Opini WTP 8 Kali Berturut-turut, Pemkab HSS Terima Plakat dan Piagam,* 20 Oktober 2021.
2. <https://kalsel.antaranews.com/berita/288389/bupati-hss-terima-piagam-wtp-2020-dan-plakat-penghargaan-predikat-wtp>, *Bupati HSS terima piagam WTP 2020 dan plakat penghargaan predikat WTP,* 20 Oktober 2021.

**Catatan Berita:**

* Laporan Keuangan Pemerintah terdiri atas dua jenis, yaitu (PSAP Nomor 01):
1. Laporan pelaksanaan anggaran *(budgetary reports)*;

Laporan pelaksanaan anggaran terdiri atas Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan Laporan Perubahan Saldo (SAL)

1. Laporan financial (*financial report*).

Laporan financial terdiri atas Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), Laporan Arus Kas (LAK), dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Sumber: <https://www.scribd.com>

* **Menurut SPAP (Standar Profesional Akuntan Publik), opini audit ada 5 macam, yaitu :**
* **Pendapat wajar tanpa pengecualian (**Unqualified Opinion**) – WTP**

Pendapat wajar tanpa pengecualian menyatakan bahwa laporan keuangan menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas entitas tertentu sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

* **Opini Wajar Tanpa Pengecualian dengan Paragraf Penjelasan (Modified Unqualified Opinion) – WTP – DPP**

Keadaan tertentu mungkin mengharuskan auditor menambahkan suatu paragraf penjelasan (atau bahasa penjelasan yang lain) dalam laporan auditnya.

* **Pendapat wajar dengan pengecualian (**qualified opinion**) – WDP**

Pendapat wajar dengan pengecualian, menyatakan bahwa laporan keuangan menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas entitas tertentu sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia, kecuali untuk dampak hal-hal yang berhubungan dengan yang dikecualikan.

* **Pendapat tidak wajar (**Adverse Opinion**) – TW**

Pendapat tidak wajar menyatakan bahwa laporan keuangan tidak menyajikan secara wajar posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas entitas tertentu sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

* **Pernyataan tidak memberikan pendapat (**Disclaimer of Opinion**) – TMP**

Pernyataan tidak memberikan pendapat menyatakan bahwa auditor tidak menyatakan pendapat atas laporan keuangan.